

MEKANISME PELAKSANAAN

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

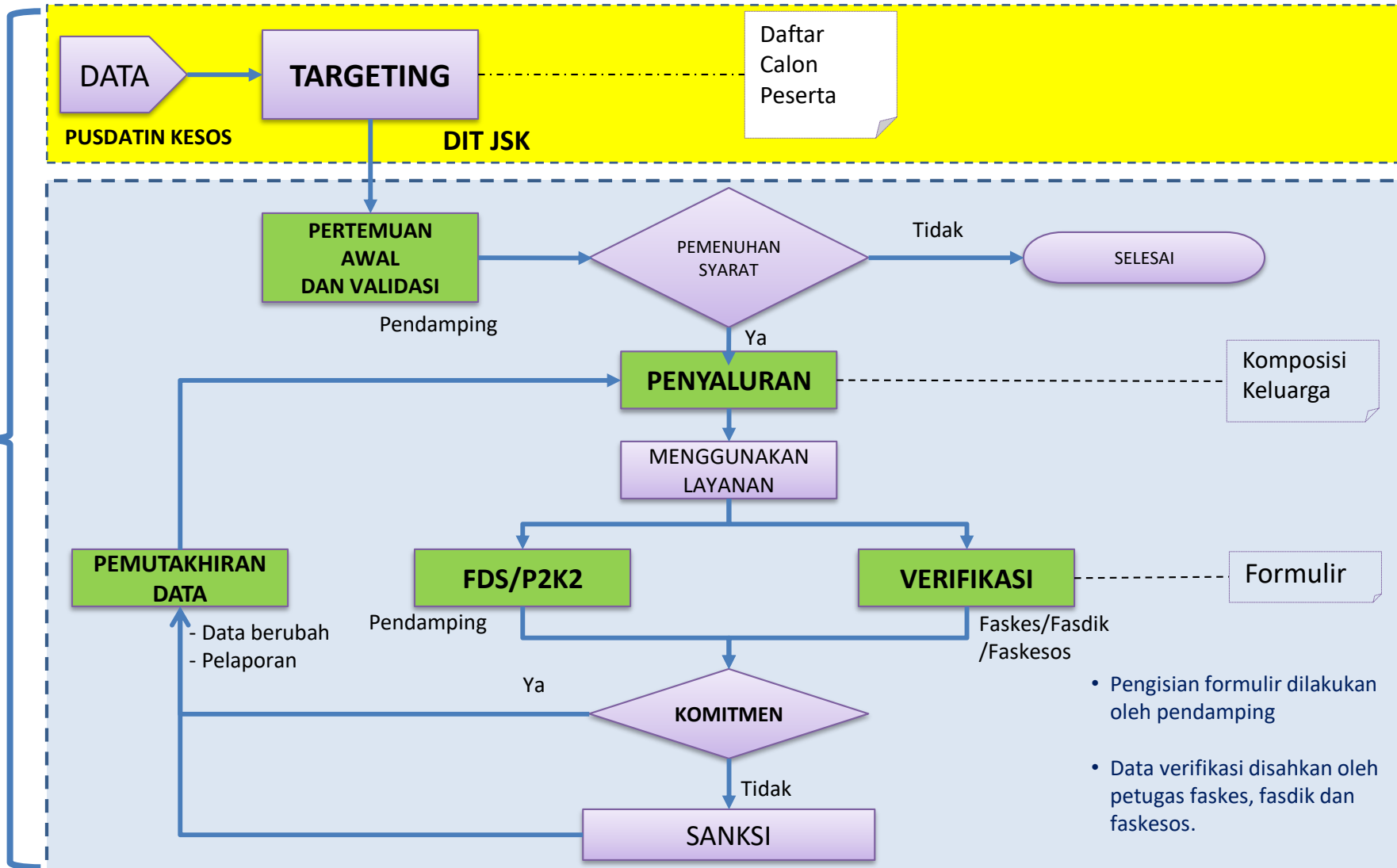


Referensi Pedoman Pelaksanaan
PKH Tahun 2016, Bab III - VI

Outline



#1 Alur Pelaksanaan PKH



MONITORING
EVALUASI

SISTEM
PENGADUAN
MASYARAKAT

#2 Penetapan Sasaran



#3 Pertemuan Awal & Validasi



Pertemuan Awal

- Sosialisasi Program

Validasi

- Pencocokan Data
- Penetapan Peserta

#4 Penyaluran Bantuan

Indeks dan Komponen Bantuan

Diberikan 4 tahap dalam 1 tahun

Bentuk tunai dan non tunai (layanan keuangan digital)



NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp)
1	Bantuan tetap	500.000,-
2	Bantuan ibu hamil/menyusui	1.200.000,-
3	Bantuan anak usia di bawah 6 (enam) tahun	1.200.000,-
4	Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat	450.000,-
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat	750.000,-
6	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	1.000.000,-
7	Bantuan penyandang disabilitas berat	3.100.000,-
8	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	1.900.000,-

Keputusan Menteri Sosial

Ketentuan Indeks dan Komponen Bantuan



- **Bantuan Tetap**
 - Diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar
- **Bantuan Komponen Kesehatan**
 - Sebagai stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu memiliki anak balita
- **Bantuan Komponen Pendidikan**
 - Sebagai stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi anak usia pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- **Bantuan Penyandang Disabilitas Berat**
 - Sebagai stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas **dalam keluarga** peserta PKH
- **Bantuan Lanjut usia**
 - Sebagai stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi lanjut usia peserta PKH

Ketentuan Bantuan PKH

» Tahap Penyaluran

1. Bantuan tetap diberikan 1 kali dalam setahun
2. Bantuan komponen diberikan dalam 4 tahap penyaluran

» Komponen Penerima Bantuan

1. Bantuan diberikan kepada maksimal 3 anggota keluarga sesuai komponen dan kriteria
2. Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari 3 anggota keluarga, maka bantuan PKH diberikan kepada komponen dengan nilai nominal terbesar
3. Kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai tambahan komponen kepesertaan
4. Seluruh komponen kepesertaan wajib memenuhi komitmen meskipun tidak terhitung sebagai penerima bantuan



#5 Pengembangan Kepesertaan



Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen dilakukan dalam 2 hal yaitu:

**Terdaftar
(Enrollment)**

- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Pendidikan
- Fasilitas Kesejahteraan Sosial

**Kehadiran
(Attendance)**

- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Pendidikan
- Fasilitas Kesejahteraan Sosial

Verifikasi komitmen berlaku untuk seluruh anggota keluarga peserta PKH.



#5 Pengembangan Kepesertaan

Verifikasi Kewajiban Peserta

Ibu hamil/ Nifas



- Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.
- Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes.
- Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.

Bayi



Usia 0-11 bulan :

- Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.

Usia 6-11 bulan :

- Mendapat suplemen vit A



Lansia 70 tahun ke atas:

1. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
2. Mengikuti kegiatan sosial (*day care*)

Balita



•Usia 1-5 tahun :

imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan, setiap bulan

•Usia 5-6 tahun :

Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun

•Usia 6 – 7 tahun:

Timbang badan di faskes



Penyandang Disabilitas Berat

Disabilitas Berat:

1. Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
2. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*)

Anak Sekolah



Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP, SLTA) :

- Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan
- Minimal 85 % kehadiran dikelas

Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *master database*.

Contoh pemutakhiran meliputi:

- Perubahan tempat tinggal
- Kelahiran anggota keluarga
- Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dan sebagainya)
- Masuknya anak-anak baru ke sekolah
- Ibu hamil
- Perbaikan nama atau dokumen-dokumen
- Perubahan nama ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili)
- Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses
- Perubahan variabel sinergitas program



Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session (FDS)*

Sebuah intervensi
perubahan perilaku yang
diberikan bagi peserta PKH.

Proses belajar secara
terstruktur untuk
meningkatkan
keterampilan hidup
masyarakat miskin.

Disampaikan melalui
pertemuan kelompok
bulanan oleh Pendamping
PKH.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

KESEHATAN: Gizi, Pelayanan Ibu Hamil dan bersalin, Pelayanan Ibu Nifas dan Menyusui, Pelayanan Bayi, Pelayanan Remaja, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PENDIDIKAN: Menjadi Orangtua hebat , Memahami Perilaku dan belajar anak usia dini, Meningkatkan perilaku baik anak, Bermain sebagai cara anak belajar , Meningkatkan kemampuan bahasa anak, Membantu anak sukses di sekolah

EKONOMI: Pengelolaan Keuangan Keluarga, Tabungan dan Kredit, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Kewirausahaan, Pemasaran

PERLINDUNGAN ANAK: Perlindungan Anak, Hak Anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus, Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Ibu

KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA: Pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan lansia, dukungan yang dapat diberikan keluarga dan masyarakat terhadap lansia

LAYANAN UNTUK DISABILITAS BERAT: Pengenalan terhadap jenis disabilitas, perawatan yang dibutuhkan disabilitas berat, dukungan yang dapat diberikan keluarga dan masyarakat

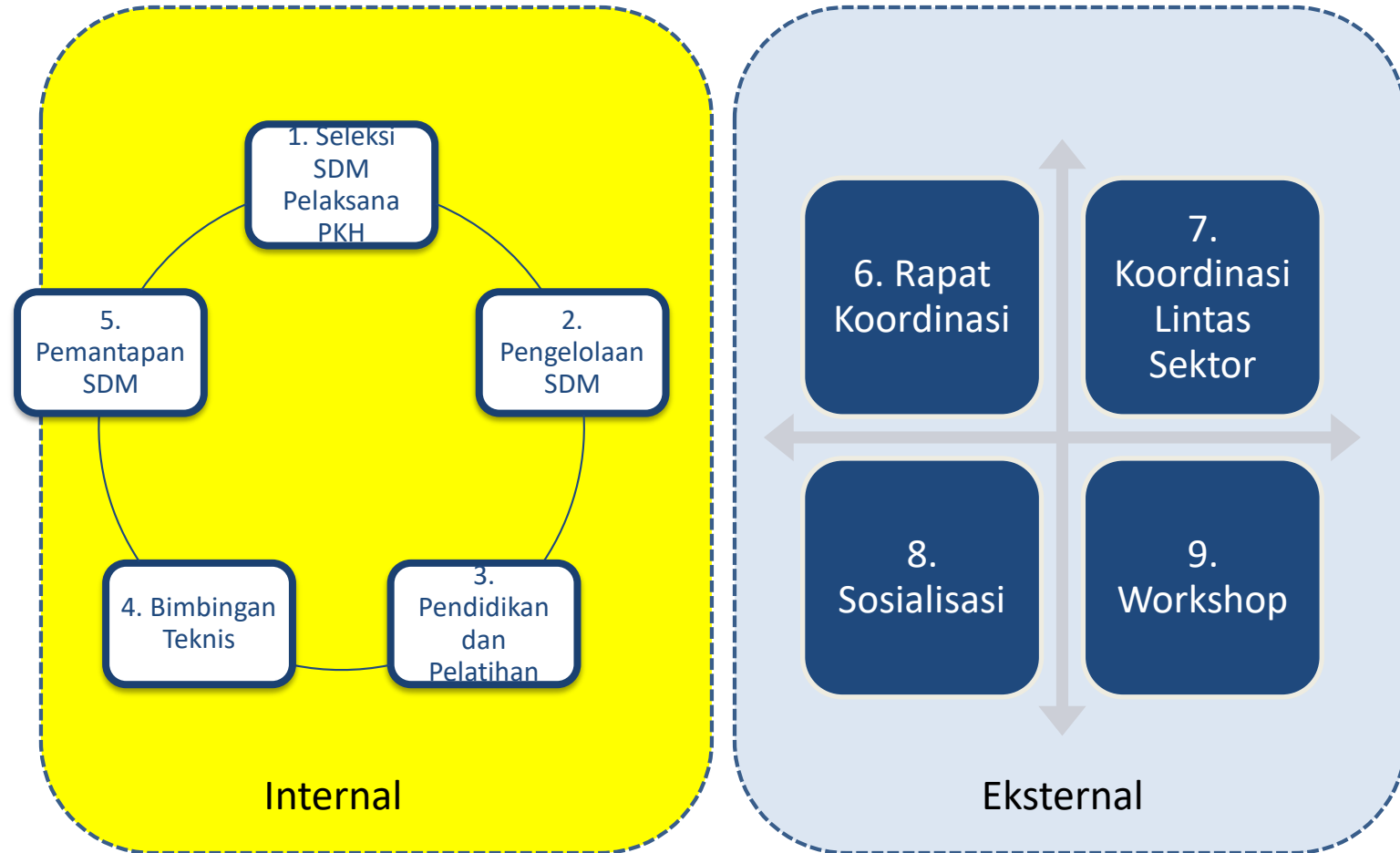
Bantuan Komplementaritas Peserta PKH

Program-program perlindungan sosial dan jaminan sosial didesain untuk **saling melengkapi** sehingga menimbulkan **daya ungkit** yang besar **dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.**

Peserta PKH berhak memperoleh bantuan komplementaritas lainnya.



#6 Pengelolaan Sumber Daya



TIM KOORDINASI NASIONAL

PENGARAH : MENTERI KOORDINATOR PMK

KETUA : MENTERI SOSIAL

ANGGOTA

Pejabat Eselon 1 yang membidangi urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi dan informasi

- Kementerian Sosial
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Agama
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementrian PPN/Bappenas
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Badan Pusat Statistik

TIM KOORDINASI TEKNIS

PENGARAH : MENTERI SOSIAL

KETUA : DIRJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

ANGGOTA

Pejabat Eselon 2 yang membidangi urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, fakir miskin, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi informasi, publikasi, kerjasama, kelembagaan, perencanaan, keuangan dan audit.

- Kementerian Sosial
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Agama
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementrian PPN/Bappenas
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Badan Pusat Statistik

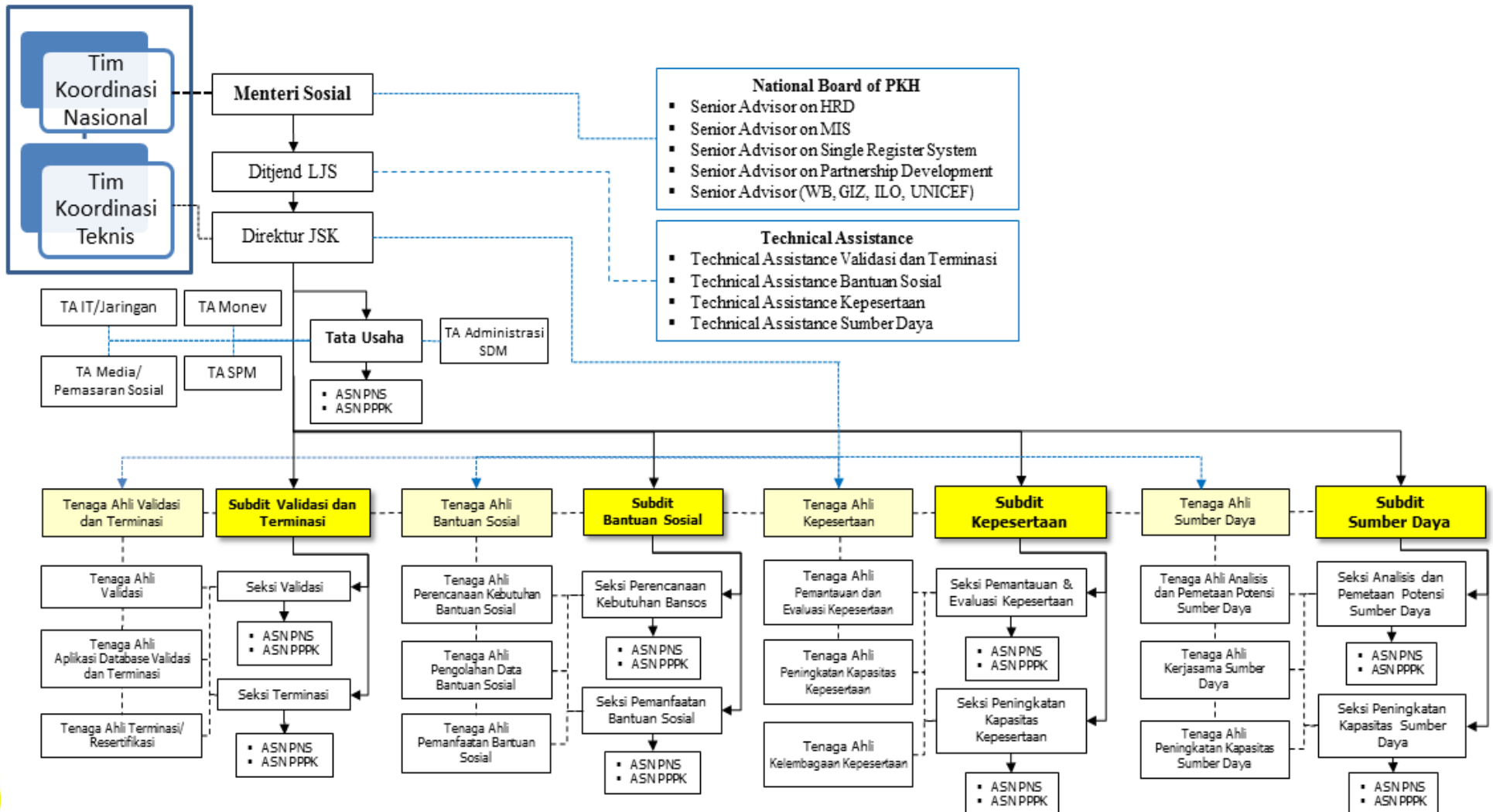
#7 Organisasi Pelaksana

PELAKSANA PKH

Dirketorat Jaminan Sosial Keluarga

Ditjen Linjamsos

Kementerian Sosial RI



#7 Organisasi Pelaksana

TIM KOORDINASI TEKNIS PROVINSI



Anggota tim:

- a) Kepala Dinas/Instansi Pendidikan
- b) Kepala Dinas/Instansi Kesehatan
- c) Kepala BPS Provinsi
- d) Kepala BPS Provinsi
- e) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
- f) Kepala Dinas/Instansi Komunikasi dan Informatika
- g) Kepala Dinas/Instansi Tenaga Kerja
- h) Kepala Dinas/Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil
- i) Lembaga lain yang dianggap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah

#7 Organisasi Pelaksana

TIM KOORDINASI TEKNIS KABUPATEN/KOTA



Anggota tim:

- a) Kepala Dinas/Instansi Pendidikan
- b) Kepala Dinas/Instansi Kesehatan
- c) Kepala BPS Kabupaten/ Kota
- d) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
- e) Kepala Dinas/Instansi Komunikasi dan Informatika
- f) Kepala Dinas/Instansi Tenaga Kerja
- g) Kepala Dinas/Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil
- h) Lembaga lain yang dianggap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

#7 Organisasi Pelaksana

TIM KOORDINASI TEKNIS KECAMATAN

Kepala Bappeda sebagai
Pembina

Kepala Dinas Sosial selaku
Ketua Tim Pengarah

Camat selaku Ketua Tim
Koordinasi Teknis

Koordinator Pendamping
selaku Sekretaris

Anggota tim:

- a) Kepala UPT Pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
- b) Kepala UPT Kesehatan
- c) Pendamping PKH
- d) Kepala Desa/ Lurah lokasi PKH
- e) Lembaga lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kecamatan

#7 Organisasi Pelaksana

PELAKSANA PKH PROVINSI

Kepala Dinas sebagai Pengarah

Kepala Bidang Dinas Sosial
penanggung jawab PKH selaku Ketua
Pelaksana PKH

Kepala Seksi selaku Ketua Tim
Koordinasi Teknis

Tenaga Ahli

Anggota tim adalah staf Dinas Sosial yang bertanggung jawab pada bidang:

1. Data Keluarga Miskin,
2. Sistem Pengaduan Masyarakat,
3. Penyaluran bantuan,
4. Verifikasi,
5. Monitoring Evaluasi

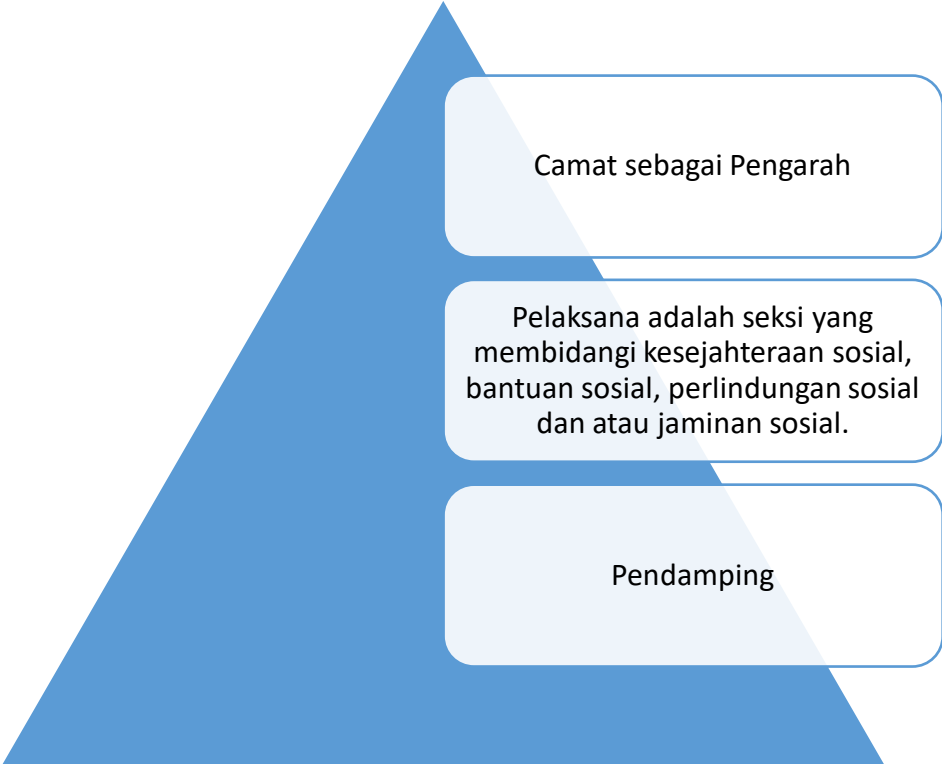
#7 Organisasi Pelaksana

PELAKSANA PKH KABUPATEN/KOTA



#7 Organisasi Pelaksana

PELAKSANA PKH KECAMATAN



Camat sebagai Pengarah

Pelaksana adalah seksi yang membidangi kesejahteraan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial dan atau jaminan sosial.

Pendamping

Pengertian MONEV

Monitoring → kegiatan pemantauan terhadap suatu proses pelaksanaan program secara terus menerus.

- Monitoring partisipasi masyarakat
- Monitoring oleh pemerintah
- Monitoring oleh pihak lain

Evaluasi → kegiatan analisis atas sebab-sebab tercapai atau tidaknya target dari suatu program

Berhasil/tidak tercapai, relevansi terhadap tujuan, efisiensi, efektivitas, dampak, pembelajaran

MONITORING

- INPUT
- PROSES BISNIS
- OUTPUT

EVALUASI

- PROSES BISNIS
- DAMPAK
- STUDI KUANTITATIF /KUALITATIF

Sistem Pengaduan Masyarakat

Ruang Lingkup SPM

Penanganan
(*handling*)

Dokumentasi
(*documentation*)

Analisis (*analysis*)

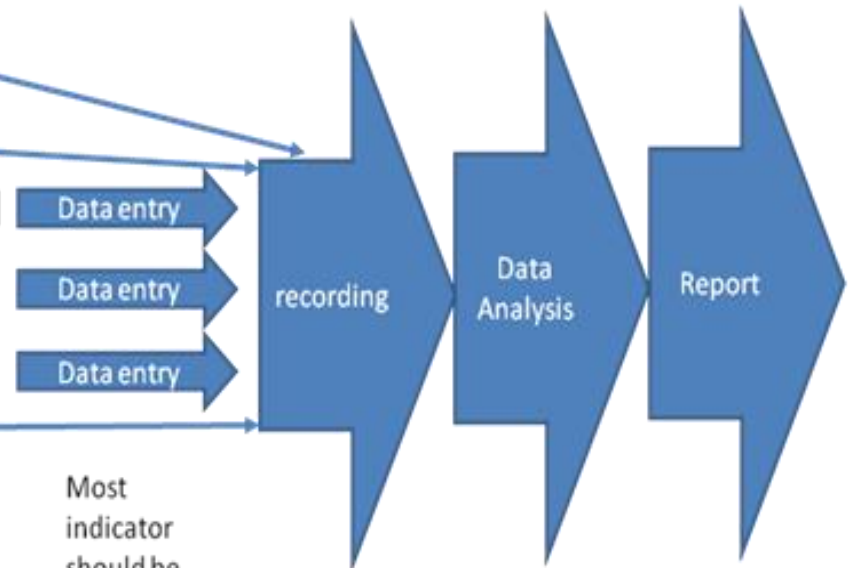
Distribusi
(*distribution*)

Penyelesaian masalah
(*solution-making*)

Multiple Input Single Output

Channel

- Sim PKH/Operator
- Web
- Tatap Muka → Personal
- Telp single number
- Postcard/dropbox
- SMS



Most indicator should be same



“ “ Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial ” ”



Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial RI

Terima Kasih

